

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2019.
- Alwi Wahyudi. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Badudu-Zein. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bintara R. Saragih, 1988, Lembaga Perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta. Vol. 8 no. 1 Maret 2014 ISSN : 1978-6697 Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum
- Luthfi Widagdo Eddyono. Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 2017.
- Latipah Nasution. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. 'Adalah: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 84.
- Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press. 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad Afied Hambali Polisi Penyelidikan Penyidikan Polisi Sentra Gakkumdu Bawaslu Pengadilan Lex Privatum Vol. IX/No. 7/Jun/2021
- Nazir. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Ricca Anggraeni *Ilmu Perundang-undangan*. Depok. Rajawali Press. 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syofyan Hadi. Fungsi Representative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Otonomi. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2013, hlm. 48
- S. Sodikin. Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal

Cita Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2(1), 2014, hlm. 108.

S.Thane. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, 2012, papua.go.id

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996).

Zoelva, H. Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10 (3) 378-398, 2013.

Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.